

## ARTIKEL

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI STASIUN TAWANG KOTA SEMARANG

*The Policy Implementation of No Smoking Areas in Tawang Station Semarang City*

Oleh :

Hendry Eka Prasetya , Ari Subowo, Aufarul Marom

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### ABSTRACT

*Air has a very important function, the required control efforts on the sources of air pollutants is cigarette one. Follow-up of the impact of smoking on human health and the environment, so Semarang government made the Semarang Mayor Regulation No. 12 Year 2009 about the No Smoking Area and the Limited Smoking Area in Semarang city.*

*This research in order to described how to apply the no smoking area program in Tawang station, Semarang city and the factors that hampered the no smoking area policy in the public facilities especially in the Tawang Station. This research used the phenomenon approach, it is trying for understand event and interaction on the specific situation. This approach required the assumptions that different with the way which is used for doing approach about the human attitude that purpose finding fact and cause. There are locus and fokus of this research is Tawang station as the sequential area that apply the no smoking area.*

*The results showed that the implementation of the policy of No Smoking Area has been successful but still less than optimal due to the constraints in terms of communication, responsiveness and coordination among agencies, the lack of influence of the government, the provision of facilities and infrastructure, lack of policy ineffectiveness transformation that occurred, the amount of influence the company's continue to promote the product, there isn't the policy strategy, and low support of legalization for the policy violation.*

*Suggestions submitted from this research is the government should improve the communication, responsiveness and coordination among agencies, the need for evaluation of operational policies by forming a special team, affirmed sanctions against violations of the policy, the need for community empowerment.*

**Keywords : Policy Implementation, No Smoking Area**

## **Latar belakang**

Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan maka penurunan kualitas udara akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga mutu/kualitasnya harus selalu dijaga. Untuk melindungi kualitas udara diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan tidak saja bagi perokok itu sendiri namun juga bagi orang lain disekitarnya yang bukan perokok.

Tindak lanjut dari adanya dampak rokok bagi kesehatan manusia dan lingkungan maka pemerintah daerah Kota Semarang membuat Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) Kota

Semarang. Rilis peraturan Walikota yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Mei 2009 kemudian dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mekasime pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menganjurkan tempat kerja dan tempat umum dapat membangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan. Adapun pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini lebih pada pengawasan yang bersifat sosial sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran serta masyarakat dengan supervisi dilakukan oleh tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Dalam hal pelanggaran pihak Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi administratif dengan terlebih dahulu memberikan teguran.

Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas udara yang bersih serta bebas dari asap rokok, informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan, informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok, dan peran serat

aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok.

Salah satu tempat yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok adalah stasiun yang merupakan salah satu fasilitas umum. Biasanya dalam stasiun terdapat kantor operasional, kereta api, loket, ruang tunggu, dan toko. Stasiun merupakan pelayanan umum dalam hal transportasi yang didalamnya terdapat orang-orang yang melakukan banyak aktivitas, oleh karenanya termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok karena dikhawatirkan kegiatan merokok itu sendiri akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan proses pelayanan umum.

Salah satu jalan yang ditempuh PT. KAI adalah dengan menyediakan area merokok di di sebelah ujung stasiun, akan tetapi implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok bisa dikatakan belum berhasil secara maksimal karena meski dapat dikatakan sukses menerapkan kawasan tanpa asap rokok, PT KAI masih belum dapat menghilangkan iklan atau sponsor produk rokok baik penjualan di atas kereta maupun di stasiun, padahal telah dipasang beberapa tanda dilarang merokok di lingkungan stasiun.

## **Landasan Teori dan Rumusan Masalah**

### **Administrasi Publik**

Administrasi Publik menurut **Chandler dan Plano** (Keban 2004:74): Adminisrasi negara merupakan proses dimana sumber daya dan personil public diorganisir dan dikoordnasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan public.

**Keban** (2004: 107) **menyatakan** hakekat administrasi publik :

- a. Administrasi publik lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif
- b. Administrasi publik berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik
- c. Administrasi publik berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerinta
- d. Meski berbeda dengan administrasi swasta tetapi administrasi publik *overlapping* dengan administrasi swasta
- e. Administrasi Publik diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa public

f. Administrasi publik memiliki aspek teoritis dan praktis

### **Kebijakan Publik**

Lasswell (Nugroho, 2003:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu

Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (Thoha, 2002:62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik (*Public Policy Implementation*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik menurut Webster : “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana

untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to*” (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Dari pengertian implementasi kebijakan menurut Webster ini dapat disimpulkan bahwa implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus dapat diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002 :101) tahap implementasi kebijakan tidak mudah untuk dijalankan, dimana dalam tahap ini sering timbul penyimpangan-penyimpangan dari hal yang telah ditetapkan.

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60% terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40% terhadap

implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Dari beberapa pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi itu sesungguhnya merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Proses implementasi tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menibulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu perlu adanyaantisipasi untuk menanggulangi gangguan yang dapat menyebabkan kegagalan.

Teori-teori Implementasi Kebijakan sebagaimana dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik oleh Subarsono (2006:101) salah satunya adalah:

### **Teori Merilee S Grindle**

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980:112) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup :

a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan

b. jenis manfaat yang diterima oleh *target group*

c. sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

d. apakah letak sebuah program sudah tepat

e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

f. apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

a. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

b. karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa

c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Fenomena isi kebijakan Teori Grindle meliputi enam hal, yaitu :

1. Kepentingan kelompok sasaran

Kepentingan kelompok sasaran perlu diperhatikan, ini adalah salah satu

variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah program kebijakan.

## 2. Manfaat yang diterima

Hal ini terkait dengan kepentingan kelompok sasaran, dengan adanya kejelasan kepentingan kelompok kepentingan kelompok sasaran maka akan dapat terwujud kemanfaatan yang optimal yang dapat diterima dan dirasakan oleh kelompok sasaran.

## 3. Perubahan yang diinginkan

Setiap program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak, yaitu pemerintah sebagai implementor dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran.

## 4. Ketepatan program

Program yang dilaksanakan diharapkan dapat tepat sasaran kepada mereka yang layak untuk menjadi sasaran dari program yang ada

## 5. Kejelasan implementor

Implementor adalah mereka yang melaksanakan atau pelaku dari implementasi suatu program. Dengan adanya kejelasan implementor akan

memperlancar pelaksanaan program yang ada.

## 6. SDM yang memadai

Implementor yang melaksanakan program seharusnya memenuhi standar kualitas yang baik. Memadai dalam hal ini adalah memadai dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga SDM yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program yang dibuat.

Sementara Lingkungan implementasi meliputi tiga hal, antara lain:

### 1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi

Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharap mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat. Strategi implementasi akan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.

### 2. Karakteristik rezim yang berkuasa

Ini akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat maka kesejahteraan rakyat akan dapat dengan mudah terwujud, karena rezim yang

seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi *partner* dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah.

### **Rokok**

Adapun kadar zat kimia yang terkandung dalam rokok memiliki kadar yang berbeda. Bahkan untuk merk dan jenis antara satu dengan roko yang lainnya pun memiliki kandungan yang berbeda-beda. kandungan yang paling dominan di dalam rokok adalah nikotin dan tar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka obyek yang ingin diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Impelementasi kebijakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok), di fasilitas umum khususnya di Stasiun Tawang di Kota Semarang?

2. Kendala-kendala apa sajakah yang menghambat Implementasi kebijakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di faslitas umum khususnya di Stasiun Tawang tersebut?

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu berusaha untuk memahami peristiwa serta interaksi pada situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab.

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang Kota Semarang. Lokasi penelitian di Stasiun Tawang Kota Semarang. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu ruang publik yang dikunjungi oleh banyak masyarakat dari berbagai kalangan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa data yng diperoleh dari Stasiun Tawang, dan data sekunder yang diperoleh melalui informan. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri,

yang bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan data dan menulis laporan penelitian yang dibantu dengan *interview guide* atau pedoman wawancara.

Informan dipilih dengan mempertimbangkan khusus dari peneliti, dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisa dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala dan Wakil Kepala Stasiun Tawang Kota Semarang
- b. Staff Urusan Pelayanan Stasiun Tawang Kota Semarang
- c. Masyarakat yang berada di kawasan Stasiun Tawang Kota Semarang

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, interview, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian fenomenologi oleh Creswell (1996:122) dibagi dalam beberapa langkah penelitian dimulai dari mengorganisasikan data, membaca, menemukan dan mengelompokkan makna, kemudian mengembangkan uraian dari fenomena, kemudian memberikan penjelasan naratif mengenai esensi fenomena.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**

#### **Isi Kebijakan**

#### **Dukungan Anggaran**

Kepala Stasiun Tawang menerangkan bahwa untuk membuat sebuah *smoking area*, PT KAI mengeluarkan dana sekitar 20 juta dan dana tersebut diambil dari dana operasional perusahaan, dana ini digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang. Dana ini disediakan dalam rangka pelaksanaan instruksi direksi PT KAI yang berisikan pelarangan merokok di wilayah stasiun. Hal ini berdampak pada terhambatnya proses implementasi kebijakan karena terkendala oleh masalah anggaran karena pihak PT. KAI tidak mengetahui adanya dana yang disediakan oleh pihak pemerintah dan harus mengeluarkan dana sendiri dalam rangka pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Dukungan sumber daya manusia dalam rangka implementasi kebijakan Kawasan di kawasan Stasiun Tawang menurut Kepala Stasiun dianggap sangat kurang karena jumlah pegawai yang ada di stasiun hanya sebanyak 70 orang sedangkan jumlah pengunjung setiap



harinya mencapai 5626 orang per hari hal ini berarti perbandingan antara jumlah pegawai dan jumlah pengunjung adalah 1:98 yang artinya setiap pegawai mengawasi 80 pengunjung. hal ini tentunya sangat tidak efektif, karena pegawai yang ada juga melakukan tugas sesuai dengan *job description* masing-masing, sehingga tugas pengawasan terhadap pengunjung dan penumpang yang merokok adalah tugas sampingan saja.

### **Dukungan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh pihak PT KAI adalah *smoking area* yang terletak di sebelah luar stasiun, dan *smoking area* yang berupa gerbong untuk memfasilitasi penumpang kereta yang ingin merokok. *Smoking area* dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh pengunjung seperti kursi yang berjumlah 10 buah, meja 1 buah dan asbak sebanyak 5 buah, serta sebuah pengisap asap dengan harapan asap tidak keluar ruangan sehingga tidak mengganggu perokok yang ada didalam dan pengunjung yang ada di luar *smoking area*.

### **Dukungan Masyarakat**

Dukungan untuk masyarakat yang berada di Stasiun Tawang ditunjukkan dengan mematuhi aturan yang berlaku seperti pedagang yang ada di sekitar

stasiun baik Stasiun Tawang pedagang mendukung kebijakan ini dengan tidak berjualan rokok di wilayah stasiun, adapun dukungan pengunjung stasiun terhadap pelaksanaan kebijakan ini adalah dengan tidak merokok di lingkungan stasiun kecuali di tempat yang telah disediakan, meskipun demikian tidak sedikit pula yang melanggar dengan berbagai alasan dan pertimbangan seperti lokasi *smoking area* yang cukup jauh dan pendapatan yang menurun karena tidak lagi menjual rokok.

### **Manfaat Sosial, Kesehatan dan Lingkungan**

Manfaat secara khusus yang dirasakan oleh pegawai, pedagang dan pengunjung stasiun antara lain udara di stasiun menjadi lebih bersih karena berkurangnya pencemaran udara yang disebabkan oleh adanya asap rokok salah satunya, kebersihan lingkungan menjadi lebih terjaga karena berkurangnya sampah bungkus rokok, abu rokok, dan puntung rokok, dimana sebelumnya pengunjung yang merokok seringkali membuang abu dan puntung rokok khususnya disembarang tempat karena mereka menganggap sampah yang akan dibuang berukuran kecil sehingga tidak harus dibuang di tempat sampah, bahkan mereka cenderung membuangnya di pot-pot bunga

yang tentunya berdampak pada matinya bunga yang ada di lingkungan stasiun sehingga mengurangi daya serap karbondioksida dan produksi oksigen yang ada di sekitar stasiun, yang pada akhirnya berimbas pada kesehatan pegawai, pengunjung dan penumpang.

### **Perubahan Positif dan Negatif**

Adapun perubahan positif yang dapat dilihat di lingkungan Stasiun Tawang sejak diberlakukannya kebijakan tentang Kawasan tanpa Rokok ini antara lain lingkungan menjadi lebih nyaman karena tidak terganggu dengan adanya asap rokok, dan tidak adanya puntung rokok yang berserakan. Pegawai menjadi lebih disiplin untuk tidak merokok di sembarang tempat karena mereka secara otomatis menjadi contoh bagi pengunjung dan masyarakat umum yang ada di sekitar stasiun. Perubahan lain yang dirasakan sejak berlakunya kebijakan ini adalah pedagang di lingkungan stasiun menjadi lebih tertib untuk tidak menjual rokok di lingkungan stasiun.

### **Ketepatan Lokasi**

Berdasarkan definisi tempat umum yang disebutkan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang sebagai tempat umum adalah lokasi yang tepat mengingat tempat ini digunakan oleh

banyak pihak dengan banyak kepentingan dan berbagai kebiasaan sehingga dengan diberlakukannya kebijakan ini di tempat umum tidak mengganggu siapapun justru memberi kenyamanan kepada banyak pihak, karena tujuan dari kebijakan ini adalah hanya untuk membatasi pemakaian rokok, bukan melarang seseorang untuk merokok.

Adapun yang menjadi masalah dari pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini adalah lokasi smoking area yang bagi beberapa pengunjung dirasa kurang tepat karena lokasinya terlalu jauh sehingga pengunjung merasa keberatan untuk pergi ke lokasi smoking area hanya untuk merokok.

### **Transformasi Kebijakan**

Adanya Peraturan Wali Kota Semarang dan Peraturan Daerah Kota Semarang adalah sebagai pelengkap dari kebijakan yang diambil oleh Direksi PT. KAI terkait dengan pelarangan merokok di tempat umum.

### **Indikator Penilaian Kinerja**

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa pihak stasiun sudah menyediakan tempat khusus untuk merokok, tempat tersebut terletak di sebelah timur stasiun, *smoking area* ini tersedia di Stasiun Tawang, hanya saja

untuk iklan dan penjualan rokok di stasiun belum bisa ditertibkan, dan akan dibahas tentang jarak pemasangan iklan rokok. Sesuai dengan instruksi Kepala Stasiun setiap pegawai diwajibkan untuk menegur pengunjung dan sesama pegawai yang merokok di lingkungan stasiun. Hal ini berarti pihak Stasiun Tawang sebagai pengelola tempat umum sudah melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Semarang

### **Tingkat Keberhasilan Implementasi Kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Secara khusus kekuatan dari pelaksanaan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok ini di Stasiun Tawang adalah adanya dukungan dari pihak Stasiun secara khusus dan PT KAI secara umum yaitu dengan adanya peraturan dari Direksi PT KAI untuk memberlakukan larangan merokok baik di stasiun, kantor maupun di gerbong, hal ini tentunya menjadi payung hukum yang kuat bagi terlaksananya kebijakan tentang larangan merokok mengingat adanya visi dan misi yang sama antara pihak PT. KAI dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Peluang secara khusus dari diterapkannya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di stasiun adalah kemungkinan

keberhasilan yang cukup besar mengingat adanya tujuan yang sama antara Pemerintah Daerah dan PT KAI untuk mengendalikan asap rokok yaitu dengan membuat peraturan yang sejenis.

Secara khusus kelemahan dari diterapkannya kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di stasiun adalah tidak adanya tim khusus yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ini sehingga pelanggaran sangat dimungkinkan, karena pegawai stasiun merangkap pengawas pelaksanaan kebijakan sangat tidak efektif, selain itu ringannya hukuman bagi pengunjung yang merokok di stasiun hanya berupa teguran juga membuka peluang adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

Ancaman secara khusus dari pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang sampai saat ini belum di jumapi, karena sebagian besar masyarakat terutama para perokok aktif bersedia mengikuti aturan yang di berlakukan di Stasiun Tawang.

### **Lingkungan kebijakan**

#### **Pengaruh Pemerintah**

Pengaruh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Semarang yang cukup besar sedikit banyak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tentang

Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang karena adanya pertimbangan terhadap pendapatan daerah dari pajak reklame membuat pihak stasiun khususnya Stasiun Tawang tidak bisa melarang pemasangan iklan rokok di lingkungan stasiun, untuk mengatasinya pihak stasiun hanya membatasi iklan dengan mengatur jarak antar reklame sehingga jumlah reklame tentang rokok bisa dikurangi jumlahnya tanpa banyak mengganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak reklame. Hal ini tentunya membuat kebijakan ini menjadi terkesan kurang tegas dalam hal pelarangan merokok,

### **Media Massa dan Media Elektronik**

Secara khusus peran media massa dan elektronik dalam rangka sosialisasi dan implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Stasiun khususnya Stasiun Tawang cukup besar. Adanya pemberitaan yang memuat kegiatan PT. KAI pada umumnya terkait dengan pelarangan merokok baik di lingkungan stasiun maupun di dalam kereta beserta sanksi yang diterapkan sedikit banyak dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi dari pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu pihak stasiun senantiasa mengikutsertakan awak media dalam setiap kegiatan khususnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di stasiun,

sehingga ada simbiosis mutualisme antara pihak PT. KAI dan awak media.

### **Respon Masyarakat**

Untuk perokok mereka memiliki respon yang beragam namun sebagian besar setuju dengan adanya kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok asalkan disediakan tempat khusus untuk merokok sehingga mereka tetap bisa merokok tanpa mengganggu kepentingan umum, selain itu tempat merokok diharapkan jangan terlalu jauh karena jika letaknya jauh maka akan membuat pengunjung enggan untuk menggunakannya.

### **Koordinasi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Menurut Kepala Stasiun Tawang, untuk menegur pengunjung yang nekad merokok di lingkungan stasiun biasanya tenaga keamanan atau satpam menegur dengan mengatakan “Selamat pagi/siang/malam Mas. Mohon maaf di lokasi ini dilarang merokok, lihat tulisan tanda larangan merokok itu. Mohon maaf rokoknya dimatikan atau pindah ke ujung peron untuk bisa merokok. Silahkan Mas. Pilih matikan rokok atau pindah tempat,”

### **Strategi Kebijakan**

Adapun secara khusus strategi kebijakan yang diterapkan oleh pihak

Stasiun Tawang dalam rangka pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah:

1. Mempertegas sanksi dengan harapan memperkecil jumlah pelanggaran misalnya sanksi yang ditetapkan oleh PT. KAI untuk pegawai stasiun dikenakan sanksi *grounded* atau skorsing selama 3 bulan jika merokok di lingkungan stasiun maupun di dalam kereta api.
2. Menyediakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan harapan dapat mengakomodir kebutuhan perokok aktif tanpa mengganggu perokok pasif, adapun smoking area terletak di sebelah timur stasiun, dengan dilengkapi sarana dan prasarana penunjang seperti meja, kursi, asbak, dan pengisap asap.
3. Memasang larangan merokok di beberapa tempat sebagai peringatan kepada pengunjung yang ingin merokok di lingkungan stasiun

### **Dukungan Legal**

Adapun *punishment* yang diberikan oleh pihak PT. KAI khususnya Stasiun Tawang terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran yang berupa merokok di lingkungan stasiun, di dalam kereta adalah memberikan skorsing selama 3 bulan hal ini menurut Kepala Stasiun

Tawang Bapak Anang dikarenakan pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di stasiun khususnya Stasiun Tawang sebagai daerah percontohan harus dimulai dari intern stasiun yaitu pegawai yang ada didalamnya, untuk kemudian dilanjutkan kepada masyarakat. demikian halnya dengan hukuman yang diberlakukan oleh pegawai yang tidak menegur penumpang yang merokok di dalam kereta – tidak di dalam gerbong smoking area- maka seluruh pegawai seperti Polsuska, Kondaktur, dan pengelola Restorasi diganti.

Hukuman yang diberikan kepada penumpang juga hampir sama, jika ada penumpang yang memaksa untuk tetap merokok di dalam kereta maka akan diturunkan di stasiun pemberhentian berikutnya. Hal ini sebagai bentuk kedisiplinan dan ketegasan PT.KAI dalam rangka mensukseskan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

### **Daya Tanggap Pelaksana**

Demikian halnya kerjasama yang terjalin antara pihak Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan pihak PT. KAI dalam hal ini adalah Stasiun Tawang. Daya tanggap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dinilai kurang oleh pihak stasiun, hal ini ditunjukkan dengan tidak sinkronnya

langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dengan pihak stasiun, dimana pihak pemerintah dinilai kurang tegas dalam menerapkan kebijakan yang ada, sedangkan pihak stasiun terkendala dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah seperti dalam hal pemasangan iklan rokok.

Daya tanggap pihak stasiun cukup cepat dalam rangka menanggapi Peraturan Daerah Kota Semarang terkait dengan pelarangan merokok di tempat umum yaitu dengan cara menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti smoking area baik di stasiun maupun berupa gerbong, dan memasang berbagai tanda larangan merokok di stasiun tanpa menunggu adanya dana yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini pihak Direksi PT. KAI juga mengeluarkan instruksi untuk melarang pengunjung merokok di lingkungan stasiun.

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi**

- b. Tidak tersedianya dana dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang, sehingga PT. KAI harus menyediakan dana sendiri dengan jumlah yang cukup terbatas
- c. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan

tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang masih kurang,

- d. Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, dengan berbagai alasan seperti lokasi *smoking area* yang terlalu jauh, kondisi *smoking area* yang kurang nyaman, kurangnya sosialisasi terhadap pengunjung terhadap pelaksanaan kebijakan ini
- e. Adanya benturan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pihak PT. KAI dalam hal ini Stasiun Tawang dalam hal pelarangan pemasangan iklan rokok di stasiun, hal ini terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak reklame
- f. Pengaruh perusahaan rokok yang terlalu besar kepada pemerintah daerah sehingga menghambat implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang
- g. Kurang efektifnya strategi kebijakan yang sudah dilaksanakan di stasiun tawang terutama dalam hal pembuatan *smoking area* dan pemasangan tanda larangan merokok.
- h. Adanya kelemahan dan ancaman yang mungkin muncul dari regulasi tentang pelarangan merokok di tempat umum, diantaranya ringannya hukuman yang berdampak pada semakin besarnya pelanggaran karena hukuman yang diberikan tidak

memberikan efek jera dan kemungkinan berkurangnya jumlah penumpang yang kurang nyaman dengan adanya peraturan pelarangan merokok di tempat umum

- i. Minimnya koordinasi dan daya tanggap yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pihak stasiun.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini dikatakan sudah berhasil akan tetapi masih kurang optimal meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai maupun oleh masyarakat seperti Stasiun Tawang menjadi lebih rapi dan nyaman dengan berkurangnya polusi udara akibat paparan asap rokok, berkurangnya sampah yang berserakan akibat rokok, dan berkurangnya jumlah iklan rokok. Hal ini tentunya membawa manfaat bagi masyarakat (pengunjung) baik dari segi sosial, lingkungan maupun kesehatan.

### **Saran**

1. Perlu adanya dana yang diberikan pemerintah kepada PT. KAI khususnya pihak Stasiun Tawang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok
2. Perlu adanya perbaikan dalam hal sistem operasional pelaksanaan kebijakan seperti pembentukan tim khusus yang independen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan tim tersebut ditempatkan di lokasi-lokasi yang tergolong kategori tempat umum
3. Perlu adanya sanksi yang tegas dan tidak tebang pilih bagi masyarakat dan perusahaan yang tidak mengindahkan kebijakan ini, karena tanpa sanksi yang tegas dan bersifat memaksa maka perubahan perilaku akan sulit untuk diwujudkan
4. Pemerintah harus mampu memanfaatkan kekuasaan yang ada untuk bertindak lebih tegas dan memperbaiki komunikasi dengan pihak Stasiun Tawang sehingga ada kesamaan visi dan misi dalam rangka pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok terutama dalam hal pemberian ijin pemasangan reklame rokok.
5. Perlunya dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan dari pelaksanaan

kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang yang meliputi tingkat keefektifan strategi kebijakan, keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman yang muncul selama pelaksanaan kebijakan

6. Pemerintah harus lebih tanggap terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pihak Stasiun Tawang khususnya sebagai pengelola tempat umum, sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pada pelaksanaan selanjutnya.



## Daftar Pustaka

Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*.

Surakarta : Pustaka Cakra

Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta:

Bumi AksaraMaleong. 2010

Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citra Aditya

Nugraha, dkk 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*.

Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian*

*Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

